

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar yang kuat dalam penelitian yang dilakukan. Oleh sebab itu, dengan adanya landasan teori maka penelitian akan menjadi salah satu hal yang penting karena dengan adanya landasan teori yang jelas, sistematis, dan baik dapat menjadi sebuah pondasi dan landasan dalam penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini ada lima landasan teorinya yaitu :

2.1.1 Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Ali Muhidin (2009), menjelaskan bahwa efektivitas berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang telah diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang telah diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna. Selain itu, menurut Soewarno Handyaningrat (1983) dalam Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa efektivitas adalah terperincinnya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas sendiri memiliki kata dasar efek dan biasanya digunakan dalam istilah efektivitas yang berkaitan dengan sebab akibat. Efektivitas juga merupakan suatu upaya bersama dalam pencapaian sasaran, jadi tingkat efektivitas ditunjukkan oleh tingkat pencapaian sasaran menurut James L. Gibson dalam (Pasolong, 2013).

Secara istilah efektivitas merupakan suatu hasil telah tercapainya tujuan yang telah diusahakan. Sedangkan menurut

kamus besar Bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur dan dapat membawa keberhasilan. Efektivitas adalah suatu ukuran dari produktivitas yang mengarah terhadap tercapainya suatu pekerjaan yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Tingkat keberhasilan dalam suatu program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan merupakan efektivitas program dan efektivitas tersebut mengacu pada sejauh mana suatu program dapat menghasilkan dampak sesuai dengan apa yang dikandungnya. Mahmudi (2010:143) menyebutkan bahwa efektifitas merupakan hubungan antara keluarga dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dapat dikatakan efektifitas apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir dalam kebijakan karena semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Sondang dalam Othenk (2008:4) bahwa efektifitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas juga menunjukkan bagaimana keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang sudah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran maka makin tinggi

efektivitasnya. Selain itu, Abdurahmat dalam Othenk (2008:7) menyatakan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Sedarmayanti (2009:109) mendefinisikan bahwa konsep efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran bahwa seberapa jauh target yang dapat tercapai. Efektivitas lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Menurut Supardi dalam Zikrika (2015:21) bahwa efektivitas adalah usaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan rencana baik dalam penggunaan data, sarana maupun waktu yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal.

2. Indikator-Indikator Efektivitas

Efektivitas dapat diukur berdasarkan beberapa indikator, menurut Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2011:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

- a. Ketepatan penentuan waktu, tingkat keefektifan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan dapat dipengaruhi oleh waktu yang digunakan secara tepat.
- b. Ketepatan Perhitungan Biaya, dalam melaksanakan suatu program perlu memperhitungkan biaya supaya dalam

pelaksanaan dana atau anggaran tidak mengalami kekurangan.

- c. Ketepatan dalam Pengukuran, untuk mencapai keefektivitasan perlu menerapkan standarisasi dalam menjalankan suatu kegiatan dapat menjadi sebuah patokan dalam menjalankan program.
- d. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan, perlu menentukan pilihan dengan proses yang tepat supaya tujuan bisa tercapai.
- e. Ketepatan Berpikir, menggunakan ketepatan berpikir dapat mempengaruhi bagaimana tingkat keefektivan pencapaian tujuan yang bisa tercapai.
- f. Ketepatan dalam Melakukan Perintah, menyampaikan perintah yang jelas dalam setiap aktivitas individu atau kelompok.
- g. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan, efektivitas pelaksanaan program ditopang oleh penetapan tujuan yang tepat.
- h. Ketepatan Sasaran, dengan penentuan sasaran yang tepat maka program tersebut dapat dikatakan bahwa sudah tercapainya keberhasilan aktivitas.

Selain itu, Mukhtar (2016) menjelaskan indikator efektivitas sebagai berikut :

- a. Kepuasan Kerja, dalam pekerjaan jika seseorang merasa puas dalam memenuhi keterampilan, kemampuan, dan harapan pekerjaan mereka maka bisa disebut dengan kepuasan kerja.
- b. Produktivitas, dalam misi dan tujuan organisasi bahwa setiap instansi memiliki input dan output yang perlu disesuaikan. Produktivitas tersebut merupakan tindakan dari input dan output itu sendiri.
- c. Efisiensi, pemaksimalan dan pemanfaatan terhadap biaya dengan membandingkan beberapa aspek prestasi.
- d. Kemampuan Beradaptasi, kemampuan beradaptasi ini bertujuan untuk mengukur bagaimana tingkatan yang ada di organisasi dalam menyelesaikan suatu perubahan internal maupun juga eksternal. Kemampuan beradaptasi mengacu pada kemampuan yang ada dalam manajemen untuk merasakan bagaimana perubahan yang ada di lingkungan sebuah organisasi.
- e. Pengembangan, Pengembangan merupakan alat untuk mengukur kemampuan organisasi untuk menaikkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan lingkungan. Usaha pembinaan umumnya dilakukan dengan menggunakan cara pembinaan pada karyawan.

Berdasarkan penjelasan uraian indikator-indikator diatas untuk menentukan tingkatan efektivitas suatu program dilihat dari jumlah indikator yang sudah terpenuhi, apabila keenam indikator

sudah tercapai maka tingkat keefektifitasnya sangat tinggi dan apabila ada indikator yang belum terpenuhi maka suatu program dapat dikatakan pengaruh efektivitasnya lemah.

2.1.2 Program

1. Pengertian Program

Program merupakan instruksi, rencana, kegiatan, pedoman, acara, dan daftar yang berurutan. Program menurut KBBI, sebagai suatu rancangan dari asas dan usaha. Penggunaan kata program bisa dalam ranah perekonomian, ketatanegaraan, dan masih banyak lagi. Program dibuat dengan menerapkan susunan yang berurutan. Secara umum program merupakan suatu penjabaran dari suatu rencana. Program dikatakan baik ketika program tersebut didasarkan atas model teoritis yang jelas.

Kayatomo dalam Rukmana (2013:36) mengatakan bahwa program sebagai rangkaian sebuah aktivitas yang mempunyai permulaan yang dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapatkan suatu tujuan. Menurut Primahendra dalam Wulandari (2018:9) bahwa program merupakan sebuah sistem yang bekerja dengan berbagai dukungan seperti sarana prasarana, pendanaan, partisipasi sasaran, keaktifan peserta program, dan adanya timbal balik dengan pihak pelaksana. Program dapat dikatakan efektif apabila program tersebut memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dan telah menggunakan sumber daya yang ada

secara maksimal untuk mendukung bagaimana pelaksanaan program tersebut jalan.

Terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program menurut Charles O. Jones dalam Siti Erna Latifi Suryana (2009:28) yaitu :

- a. Pengorganisasian, dalam mengoperasikan suatu program diperlukan struktur organisasi yang jelas supaya dalam pelaksanaan sumber daya manusia kompeten dan berkualitas.
- b. Interpretasi, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai maka para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana.
- c. Penerapan atau aplikasi, dengan adanya pembuatan prosedur yang jelas supaya program kerja dapat berjalan sesuai jadwal kegiatan dan tidak berbenturan dengan program lainnya.

Selain itu, terdapat lima ciri-ciri supaya program itu dapat dikatakan program yang baik menurut Zauhar (1993:2) yaitu :

- a. Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai maka perlu adanya penentuan peralatan yang terbaik.
- b. Mempunyai suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan proyek yang saling berkaitan.
- c. Pengukuran biaya yang telah diperkirakan dan keuntungan yang diharapkan dari hasil program tersebut.

- d. Suatu program tidak dapat berdiri sendiri maka perlu adanya hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan pembangunan lainnya.
- e. Mempunyai berbagai upaya dibidang manajemen termasuk dalam penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. Dalam menentukan suatu program perlu dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan supaya dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat.

Semakin banyaknya permasalahan yang timbul maka akan semakin banyaknya juga program yang akan dibutuhkan. Dengan adanya program maka bertujuan dapat menyelesaikan berbagai masalah. Selain itu program juga dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan inovasi serta partisipasi masyarakat melalui sebuah program yang telah dibuat.

2. Implementasi Program

Van Meter dan Van Horn dalam Solichin (2008:135) mengatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat dan kelompok pemerintah atau swasta yang akan diarahkan pada pencapaian dan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan sebuah kebijakan yang telah ditentukan. Implementasi dalam KBBI merupakan pelaksanaan atau

penerapan yang berkaitan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan agar mencapai tujuan tertentu.

Arikunto (1998:1) mengatakan bahwa implementasi program merupakan sebuah kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi kegiatan yang telah dilaksanakan bukan bentuk dari program karena suatu program adalah kegiatan yang direncanakan maka tentu saja perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Jones dalam Rochman (2009, 101) menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijakan yang mendahuluinya. Sedangkan Afiful Ikhwan mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan yang disusun secara terperinci karena implementasi dilaksanakan setelah melakukan perencanaan pada hakikatnya proses pengambilan keputusan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan.

2.1.3 Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan bahwa bantuan langsung tunai atau biasa disebut dengan BLT merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat miskin dengan memiliki syarat ataupun tidak memiliki syarat. Bantuan ini menekan kemiskinan

dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan uang kontan atau dapat berupa bantuan lain. Tujuan pemerintah menyalurkan dana program BLT untuk memberikan keringanan kepada masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena dengan adanya program ini dapat menjadi penyelesaian jangka pendek sehingga masyarakat miskin tidak melakukan menjual aset yang dimilikinya, putus sekolah, dan mengurangi konsumsi makanan yang sehat dan bergizi.

Bantuan langsung tunai merupakan salah satu program yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada masyarakat yang membutuhkan supaya masyarakat dapat bertahan dalam situasi krisis harga pangan, bencana alam, dan pandemi. Bantuan langsung tunai adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan oleh pemerintah secara langsung kepada masyarakat supaya mengurangi beban ekonomi dan BLT pada umumnya diberikan kepada masyarakat yang biasanya telah kehilangan mata pencaharian.

Program bantuan langsung tunai memiliki dampak positif karena program ini berfokus untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Kebijakan ini harus dapat dikelola dengan baik supaya efektif dan pemerintah harus melakukan program ini dengan

transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan sehingga program BLT dapat mendapatkan manfaat baik yang dirasakan oleh masyarakat. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan membuat program bantuan langsung tunai ini. Berdasarkan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, bantuan sosial memiliki beberapa jenis program yaitu PKH, BLT, BPNT, dan juga program lainnya. Untuk mendapatkan bantuan tersebut pemerintah menetapkan beberapa kriteria-kriteria yang berhak menerima bantuan langsung tunai.

2. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Terdapat syarat dan mekanisme dalam penerimaan program bantuan langsung tunai ini sehingga kriteria penerima BLT Dana Desa dapat dilihat melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 yang telah menetapkan berbagai kriteria untuk memastikan program ini tepat sasaran. Berikut ulasan kriteria penerima bantuan langsung tunai pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Pasal 18 :

- (1) Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut :
- a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis dan / atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
 - d. Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia;
dan / atau
 - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi keluarga penerima manfaat BLT Desa.

- (6) Dalam hal pemerintah Daerah tidak memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/wali kota dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada kementerian koordinator yang menangani urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dengan adanya kriteria penerima bantuan langsung tunai dana desa 2025 yang dirancang dapat menjangkau masyarakat desa yang membutuhkan, karena dengan adanya penggunaan data yang akurat sehingga penerapan kriteria ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ada 14 kriteria dalam menentukan keluarga rumah tangga miskin yaitu :

- a. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, kayu yang tidak berkualitas, dan bambu.
- b. Luas pada lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m per orang.
- c. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau digunakan bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- d. Sumber penerangan pada rumah tidak menggunakan tenaga listrik.

- e. Sumber air minum berasal dari air sumur, mata air tidak terlindungi, sungai, dan air hujan.
- f. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa di plester.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, dan minyak tanah.
- h. Hanya dapat mengkonsumsi daging, susu, ayam dalam satu kali seminggu.
- i. Hanya dapat membeli satu set pakaian baru setahun sekali.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
- k. Tidak memiliki akses kesehatan, tidak sanggup membiayai pengobatan.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500m, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga ; tidak sekolah atau tidak tamat SD.
- n. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Masyarakat dapat dikatakan miskin jika minimal variabel diatas terpenuhi dalam suatu rumah tangga.

2.1.4 Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang digunakan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar, dan
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Menurut Pasal 72 Undang Undang 6 tahun 2014 bahwa desa memiliki beberapa sumber pendapatan. Jika dirinci pendapatnya berasal dari pendapatan asli, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian hasil pajak, dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta dana desa. Dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang berfungsi untuk diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang merupakan sebuah sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang

diterima paling sedikit 10%. Dana tersebut harus dapat digunakan secara konsisten dan terkendali. Bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip.

Menurut Lili bahwa dana desa adalah kucuran dana yang dapat diterima desa setiap tahun yang berasal dari pajak dan APBN APBD kabupaten/kota yang telah dipakai untuk mendanai segala proses kegiatan sekaligus pembangunan pedesaan bagi pemerintahan desa. Manfaat adanya dana desa ini dapat memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung terutama masyarakat miskin, karena dana desa di tahun 2025 dapat mengatasi masalah ketimpangan dalam suatu desa. Dengan adanya dana desa maka dapat menciptakan pemberdayaan masyarakat yang adil dan makmur. Sementara tujuan alokasi dana desa adalah :

- a. Mengatasi kemiskinan dan dapat mengurangi kesenjangan desa.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.

- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa.
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Operasional penyelenggaraan pemerintah desa untuk pembiayaan operasional desa pemerintah desa menerima alokasi dana sebesar 30%, dana tersebut untuk pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang taruna, dan Linmas dana desa yang diterima oleh pemerintah desa sebesar 70%.

2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa terbagi dua mekanisme yaitu tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara

(RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Mekanisme pencairan dana dan penyaluran alokasi dana desa ialah :

- a. Pencairan dana desa dapat dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan
- b. Pencairan tahap pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan disertai kelengkapan administrasi yang sudah ditentukan.
- c. Pencairan tahap kedua ditentukan apabila penggunaan pada pencairan tahap pertama sudah dilakukan dengan baik secara administratif, secara teknis, dan secara hukum.
- d. Pencairan dana tahap pertama dan tahap kedua dilakukan dengan pemindahan buku dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran alokasi dana desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas.

Prosedur pada pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan sebagai berikut :

- a. Langkah pertama yang dilakukan yaitu bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa dengan dilampiri Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.

- b. Sekretaris desa melakukan verifikasi berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap lalu sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani oleh kepala desa.
- c. Setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat maka bendahara mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- d. Terakhir dana yang sudah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan yang telah disertai dengan bukti penerimaan.

2.1.5 Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Jim Ife dalam bukunya yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice* (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat telah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam menentukan masa depan dan dapat bertasipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu tindakan yang mulia, sebab program pemberdayaan masyarakat dapat membantu masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya secara mandiri, tetapi berpengaruh pada pembangunan nasional.

Menurut Dedeh Maryam dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019:8) dalam bukunya *Pemberdayaan Masyarakat* menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berproses pada pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan agar meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat supaya mampu mengelola sumber daya, membuat keputusan, dan bertindak secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Menurut Robert Chambers mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses dimana individu dan komunitas mencapai kendali atas faktor-faktor yang telah mempengaruhi kehidupan. Sementara itu, Paulo Freire mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu transformasi bagi mereka yang semula subjek menjadi objek sehingga dapat mengambil peran aktif dalam perubahan sosial.

Pemberdayaan masyarakat memberikan dukungan kepada masyarakat untuk menjadi agen perubahan jadi tidak hanya sekedar memberikan bantuan atau solusi dari luar saja. Melalui proses pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Menurut Edgar Walters pemberdayaan masyarakat ialah sebuah proses dimana individu dan komunitas dapat diberdayakan supaya mengenali bagaimana potensi masyarakat secara sendiri dan bekerjasama

untuk mencapai tujuan bersama. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan dari segi kapasitas, kekuatan, dan kemampuan masyarakat supaya masyarakat dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam hal sosial, ekonomi, dan politik.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2005:60) bahwa pemberdayaan bertujuan agar sebuah proses dan tujuan sebagai berikut :

- a. Dalam pemberdayaan masyarakat membutuhkan sebuah proses, pemberdayaan ialah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kelompok lemah yang ada dalam masyarakat, biasanya kelompok tersebut termasuk dalam individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.
- b. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk kepada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu kepada perubahan atas masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, bertisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri melaksanakan bagaimana melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Menurut Fahrudin (2012:96-97) pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat biasanya dilakukan dengan upaya menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, karena setiap masyarakat akan memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Upaya dalam pembangunan daya pemberdayaan dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran yang dimilikinya bahwa hal tersebut akan dapat dikembangkan. Meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang telah dimiliki oleh masyarakat dengan mempunyai kekuatan langkah-langkah nyata baik dalam penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat berdaya. Pemberdayaan masyarakat juga berupaya untuk melindungi kepentingan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi kuat atas yang lemah karena dalam proses ini pemberdayaan harus dapat dicegah untuk yang lemah menjadi bertambah lemah.

Sedangkan tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2014:202) mengatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat ada enam yaitu :

- a. Perbaikan kelembagaan (*better institution*) karena dengan adanya perbaikan kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan

maka diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan hal ini termasuk dalam perbaikan pengembangan jejaring kemitraan usaha.

- b. Perbaikan usaha (*better business*) dalam hal ini biasanya dilakukan untuk perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan perbaikan kelembagaan, dan diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaikan pendapatan (*better income*) karena dengan adanya perbaikan bisnis yang dilakukan maka diharapkan dapat memperbaiki pendapatan yang telah diperolehnya termasuk dalam pendapatan keluarga dan masyarakat.
- d. Perbaikan lingkungan (*better environment*) yaitu perbaikan pendapatan yang diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) kemiskinan atau pendapatan yang terbatas seringkali menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan.
- e. Perbaikan kehidupan (*better living*) yaitu tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang dapat membaik karena dengan adanya lingkungan membaik sehingga diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaikan masyarakat (*better community*) dengan ini diharapkan terwujud kehidupan lebih baik yang didukung oleh lingkungan fisik dan sosial.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Nurfadillah (2024) dengan judul penelitian “Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Pakubalaho Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini membahas bagaimana dampak negatif yang dapat ditimbulkan tentang bantuan langsung tunai dana desa dengan tidak mengelola dan memanfaatkan dana bantuannya untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam hal penyalahgunaan dana bantuan oleh masyarakat diharapkan terdapat hasil evaluasi penyaluran BLT-DD di desa Pakubalaho pemerintah tidak menyalurkan anggaran dana desa sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, selain itu pemerintah desa juga tidak transparan mengenai dana desa yang masuk karena terdapat penerima BLT yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kriteria. Efektivitas program BLT-DD dalam penelitian ini dapat dinyatakan berhasil sesuai dengan empat indikator yang efektif. Namun pemerintah perlu memperbaiki data untuk menetapkan penerima BLT-DD. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif bertujuan agar dapat memahami fenomena yang dialami di Desa Pakubalaho Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi langsung lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi dari hasil penelitian ini didukung oleh pengamatan langsung yang ada di lapangan sehingga penelitian ini mengetahui bagaimana dampak positif yang diberikan pemerintah melalui BLT-DD terhadap masyarakat Desa Pakulabaho dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sedangkan dampak negatif adalah masyarakat menjadi manja terus-terusan menunggu bantuan dari pemerintah.

Hasil penelitian ini menunjukkan evaluasi program BLT-DD dapat dikatakan berhasil, namun masih perlu perbaikan.

Penelitian dari Muhammad Rahmadi (2022) skripsi dengan judul Efektivitas Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sibreh Keumudee Aceh Besar) masalah dalam penelitian skripsi ini dilihat dengan pendekatan kualitatif dan adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisa deskriptif yang menjelaskan keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme penyaluran BLT-DD di Desa Sibreh Keumudee Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar dilakukan secara tunai setiap tiga bulan sekali. Dalam menyalurkan bantuan, panitia memperhatikan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan ketentuan syariat tetapi terdapat indikator yang tidak terpenuhi karena besaran dana yang diberikan tidak relevan dengan pengeluaran masyarakat sehingga tingkat efektivitas terhadap kesejahteraan masyarakat penerima bantuan BLT-DD masuk pada kategori sedang. Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara dokumentasi, metode observasi, dan metode wawancara. Saat masa pandemi covid-19 kondisi ekonomi penerima BLT-DD mengalami perubahan dimana mereka sulit dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, pemerintah membuat kebijakan atau suatu program yang bertujuan dapat menanggulangi masalah tersebut serta dapat meninjau kembali nominal anggaran bantuan langsung tunai dana desa di Desa Sibreh Keumudee.

Irfan Sofi (2021) dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa”. Penelitian ini disebabkan karena adanya Covid-19 sehingga menimbulkan dampak pada aspek ekonomi. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga sampel dalam penelitian ditentukan dengan memakai metode *purposive sampling* yang pengumpulan data dilakukan menggunakan survei dengan menyampaikan daftar pertanyaan kuisisioner kepada responden. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BLT-DD berjalan dengan sangat efektif dari aspek peraturan, fungsi dan tugas, rencana dan hasil. Besaran nilai dari program ini yaitu Rp. 600.000 yang diberikan setiap bulan untuk tiga bulan setiap keluarga miskin yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Rp. 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan selanjutnya. Tujuan dari penelitian yaitu untuk memahami bagaimana efektivitas pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa dan kendala dalam pemulihan ekonomi di desa-desa. Dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa program BLT-DD sudah berjalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari hasil pembagian antara outcome dengan output pelaksanaan program yang menunjukkan angka 114,93%. Namun, dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala yang dihadapi antara lain adanya keterbatasan anggaran dana desa untuk bantuan langsung tunai desa, ketidaksesuaian data dalam penentuan penerima bantuan termasuk penerima BLT-DD, dan ketersediaan infrastruktur penyaluran. Adanya BLT-DD diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang saat ini menurun, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan.

Putri Lestari (2022) skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terhadap Perekonomian Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sukarame Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan). Skripsi ini membahas tentang proses pemerintah dalam menanggapi situasi Covid-19 dengan membuat kebijakan dan berbagai program bantuan untuk membantu perekonomian masyarakat. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu program bantuan langsung tunai dana desa dengan cara memberikan uang tunai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Hasil dari penelitian skripsi menunjukkan bahwa program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang dilakukan di Desa Sukarame berjalan dengan efektif, karena hal ini pemerintah Desa Sukarame sudah berlaku adil dan baik. Keefektifan program ini dapat dilihat berdasarkan hasil analisis indikator ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan dan ketepatan sasaran. Teknik pengumpulan data yang diambil bersumber dari data utama yang didapat langsung dari lapangan dengan menggunakan sumber data primer observasi, wawancara, kuisisioner dan dokumentasi.

Ahmad Ryan Sahary (2023) yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bagi Masyarakat Miskin Di Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru – Kota Banda Aceh”. Tujuan pada penelitian skripsi ini yaitu untuk mengkaji terkait bagaimana program BLT-DD yang dilakukan oleh aparat Gampong Lamteumen Timur kepada masyarakat miskin serta bagaimana hambatan atau kendala yang dialami dalam penyaluran

program bantuan langsung tunai dana desa. Pembahasan pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan langsung tunai dana desa di Gampong Lamteumen Timur belum dapat dikatakan efektif karena dalam hal ketepatan waktu masih banyak masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pemantauan program BLT-DD belum dilakukan secara prioritas kepada masyarakat miskin penerima program tersebut. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder dengan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kesimpulan berdasarkan penelitian skripsi ini bahwa efektivitas BLT-DD belum sepenuhnya efektif walaupun ketepatan sasaran penerima program sudah memenuhi kriteria dan di salurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, adanya keterlambatan waktu dalam penyaluran bantuan yang diberikan oleh aparaturnya kepada masyarakat miskin untuk setiap bulan Januari dan Februari, dalam pemantauan program tidak ada kegiatan pemantauan lebih lanjut kepada masyarakat penerima program bantuan langsung tunai dan hanya sekedar menyalurkan dana selepas itu tidak adanya kegiatan untuk memprioritaskan masyarakat miskin, pemanfaatan bantuan BLT-DD dipergunakan dengan baik oleh masyarakat penerima program dengan membeli kebutuhan pokok dan tidak membeli hal-hal yang tidak layak dengan memakai uang bantuan tersebut sehingga masyarakat sangat terbantu dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini.

Untuk memudahkan dalam melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	GAP/Perbandingan dengan penelitian ini
1	Nurfadillah (2024)	Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Pakubalaho Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba	Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa program BLT-DD di Desa Pakubalaho telah berhasil karena hal ini sudah sesuai dengan pengukuran efektivitas terdapat empat indikator yang efektif, namun masih perlu perbaikan data penerima program sesuai dengan indikator tepat sasaran dalam penentuan penerima BLT-DD yang tidak sesuai kriteria. Dampak positif dalam penelitian ini bahwa masyarakat desa Pakubalaho dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Pada penelitian ini lebih menekankan keberhasilan program namun lebih fokus kepada evaluasi umum program, bukan spesifik pada pemberdayaan.
2	Muhammad Rahmadi (2022)	Efektivitas Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Ditinjau	Kualitatif Deskriptif	Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Sibreh Keumudee dengan adanya bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun, besaran dana yang diberikan tidak relevan dengan pengeluaran masyarakat dalam	Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi islam dan fokus pada kesejahteraan selama pandemi. Penelitian ini tidak hanya menilai apa manfaat ekonomi tetapi juga melihat bagaimana bantuan mendorong kemandirian masyarakat.

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	GAP/Perbandingan dengan penelitian ini
		Dalam perpektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sibreh Keumudee Aceh Besar)		Memenuhi kebutuhannya sehingga tingkat efektivitas terhadap kesejahteraan masyarakat miskin masuk pada kategori sedang.	
3	Irfan Sofi (2021)	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa	Kuantitatif	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berjalan dengan sangat efektif. Efektivitas hasil dari pembagian antara outcome dengan output pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menunjukkan pada angka 114,93 persen. Dalam pelaksanaan program BLT-DD terdapat beberapa kendala anatara lain keterbatasan anggaran yang ada dari dana desa dimana tidak sebanding dengan jumlah KPM di desa.	Fokus pada perbandingan <i>output</i> dan <i>outcome</i> program
4	Putri Lestari (2022)	Analisis Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Terhadap Pemberdaya	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian bahwa program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang berada di Desa Sukarame sudah berjalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil analisis	Pada penelitian ini lebih fokus pada masa pandemi Covid-19 dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi islam.

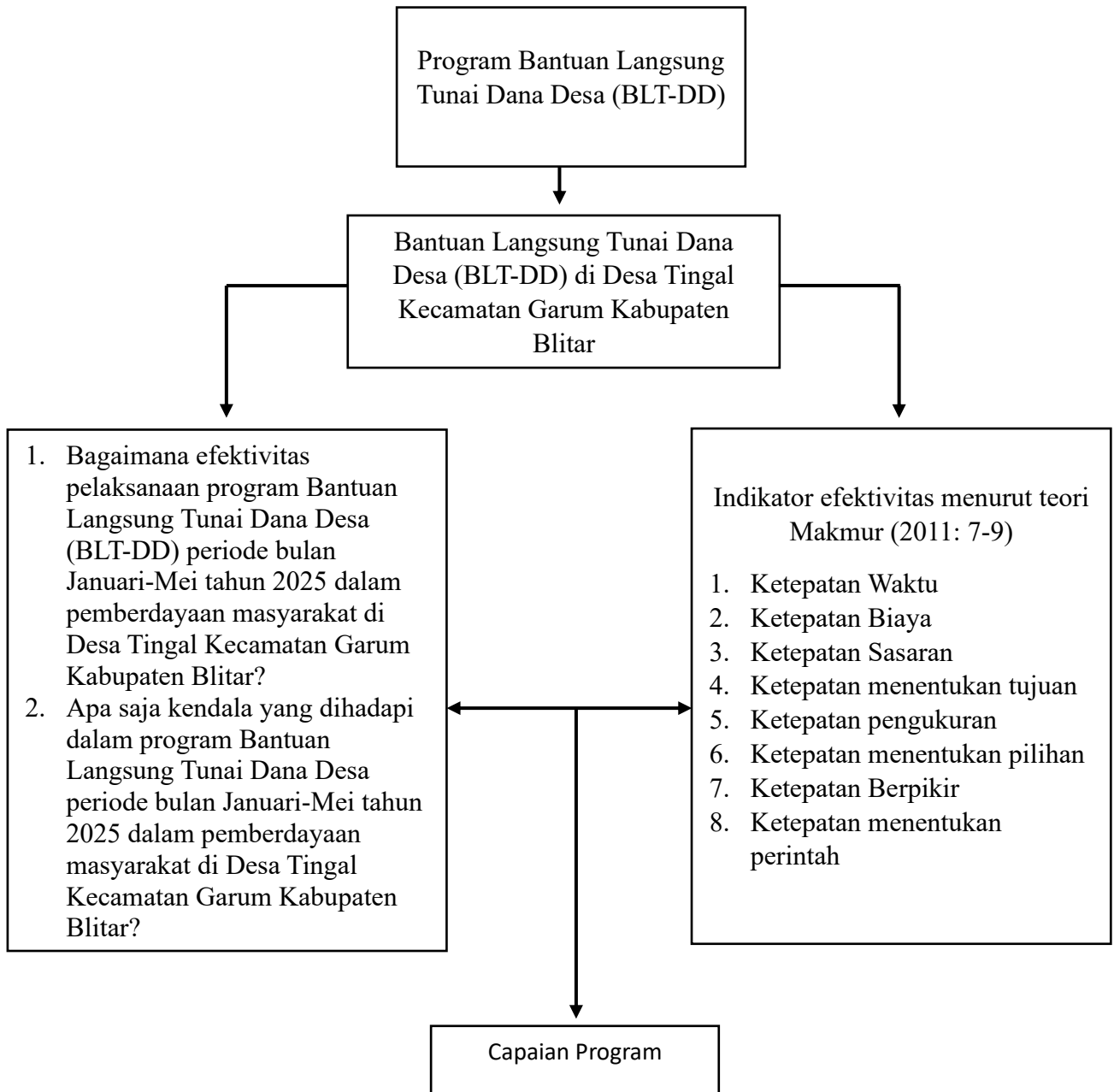
No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	GAP/Perbandingan dengan penelitian ini
		an Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sukarame Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)		Indikator ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan dan ketepatan sasaran. Tetapi, masyarakat di Desa Sukarame belum efektif dalam memanfaatkan dana dari program BLT-DD dalam peningkatan perekonomian.	
5	Ahmad Ryan Sahary (2023)	Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bagi Masyarakat Miskin Di Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru – Kota Banda Aceh	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian skripsi ini bahwa dengan adanya program BLT-DD dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat miskin penerima bantuan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tetapi, terdapat beberapa hambatan dalam proses penyaluran bantuan yaitu penyalurannya yang disalurkan tidak setiap bulan sehingga masyarakat banyak yang mengeluh. Maka program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Gampong Lamteumen Timur belum dapat	Pada penelitian ini lebih menekankan pada hambatan teknis seperti ketidakteraturan waktu pada saat penyaluran program BLT-DD.

No	Peneliti	Judul	Hasil	Metode	GAP/Perbandingan dengan peneliti ini
				Dikatakan efektif dalam hal ketepatan waktu	

Sumber : Google Scholar, diolah oleh penulis tahun 2025

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu kerangka penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar di bawah ini



Gambar 2.1

Kerangka Konsep Penelitian

Sumber : Data Primer diolah 2025